

**Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan
Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pa'jukukang
Kabupaten Bantaeng**

Disusun Oleh:

**HATTA
105640163512**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA)
DI KABUPATEN BANTAENG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

HATTA

Nomnor Stambuk: 105 64 01635 12

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMAIYAH MAKASSAR**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan
Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) Di Kabupaten
Bantaeng

Nama Mahasiswa : Hatta

Nomor Stambuk : 10564 01635 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

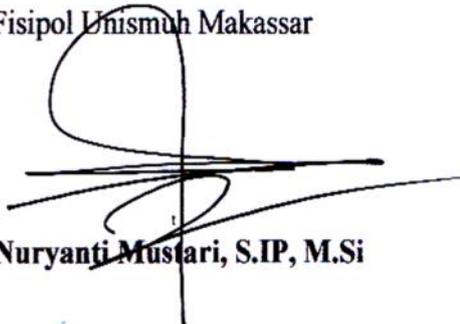
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihsan Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

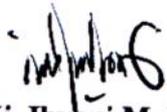
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.

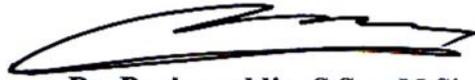
TIM PENILAI

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Sekretaris



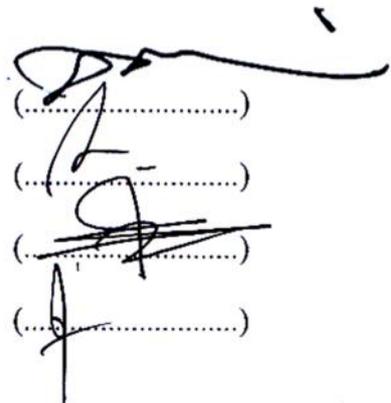
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. Si
4. Handam, S.IP, M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hatta

Nomor Stambuk : 105640163512

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benarkarya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan bukan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 Juni 2018

Yang menyatakan,

Hatta

ABSTRAK

Hatta, 2017. *Strategi Pemerinrah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pajjukukang kabupaten Bantaeng.*
(Dibimbing Oleh H. Muhlis Madani dan Handam).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kawasan industri. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Informan penelitian seluruhnya sejumlah delapan orang, masing-masing berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian dan masyarakat disekitar kawasan industri. Informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Terkait dengan dimensi-dimensi strategi yaitu Tujuan, Kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng termasuk kedalam strategi sebagai rencana, karena kita dapat melihat kepala Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala Tujuan, Kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dikembangkan secara sadarr

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pengembangan, Strategi

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami berbagai kendala Berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberukan bimbingan, motivasi arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis Selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan.
5. Teman-teman mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya kelas B angkatan 2012 atas segala bantuan dan kebersamaanya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Andi Ali Mappatauba Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data.
7. Ayahanda Malo dan Ibunda Sia atas segala pengorbanannya selama ini yang telah memberikan begitu banyak bantuan moril, materil, arahan, dan senantiasa mendoakan keberhasilan dan keselamatan bagi penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini.

Makassar, 02 Juni 2018

Hatta

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	ii
Abastrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi Pemerintahan	8
B. Konsep Kawasan Industri	21
C. Pendekatan Pengembangan Kawasan Industri.....	24
D. Tujuan Pengembangan Kawasan Industri.....	26
E. Kerangka Pikir	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Kabupaten Bantaeng	41
B. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng	44
C. Profil Kawasan Industri.....	51
D. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa pembaharuan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dampak yang paling di rasakan adalah semakin ketatnya persaingan di sektor perindustrian. Agar mampu berkembang dalam arena persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikannya sebagai motor penggerak perekonomian nasional di masa depan. Peran pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara harus betul-betul sigap dalam merancang formulasi kebijakan yang dapat berimplikasi positif dalam tatanan kenegaraan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menciptakan strategi dalam menghadapi tantangan tersebut berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki untuk mewujudkan negara yang maju dan mandiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan sangat kaya akan potensi dan sumber daya alamnya, sehingga dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengembangkan serta berdaya guna. Pengembangan kawasan industri Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Dalam menyusun rencana pengembangan kawasan industri ini merujuk pada beberapa peraturan/regulasi terkait yang menjadi dasar hukum bagi rencana pengembangan kawasan industri ini. Terdapat beberapa istilah/terminologi dalam pengembangan kawasan industri yang perlu penyamaan persepsi dengan mengacu pada sumber-sumber peraturan yang ada yaitu: Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, pasal 14 tentang perindustrian:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara republik Indonesia melalui perwilayahan industri.
2. Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. Peningkatan daya saing industri keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
3. Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. Pembangunan kawasan industri; dan
 - d. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Lahirnya otonomi daerah sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan ruang cukup luas bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor perindustrian adalah salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan.

Disisi lain dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan wewenang serta kewajiban bagi pemerintah daerah. Salah satu hak daerah adalah mengelola kekayaan daerah. Sementara kewajiban daerah antara lain adalah melestarikan lingkungan hidup, serta membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Mengelola kekayaan daerah dalam hal ini kawasan industri, sedangkan kewajiban melestarikan lingkungan hidup adalah kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola lahan kawasan industri agar lingkungan hidup tetap terjaga dan mewujudkan pembangunan melalui lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan hak dan

wewenang serta kewajiban itu harus membuat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan di bidang perindustrian.

Beberapa acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pemerintah daerah, antara lain peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintah Daerah.

Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendorong pengembangan kawasan industri adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu kawasan industri di Sulawesi Selatan telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Bantaeng tentang arah kebijakan pengembangan kawasan industri sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan kawasan strategis.
3. Pengembangan interkoneksi daerah.

Dari gambaran arahan RPJMD serta identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Bantaeng, maka visi yang ingin di capai pada tahun 2018 yang akan datang adalah Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian Selatan Sulawesi Selatan 2018.

Terkait dengan kebijakan arahan pengembangan kawasan industri Bantaeng, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Bantaeng, dalam pasal 39 ayat 2, peraturan daerah tersebut menyebutkan kawasan peruntukan industri besar.

Terkait dengan kawasan industri tersebut maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya kearah pengembangan kawasan industri tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan industri, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung industri, pengeluaran kebijakan (*policy*) industri, dan pembuatan penegakan peraturan (*regulation*).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis strategi-strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan sebelumnya menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis. Suatu tujuan dasar dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi. Tujuan dan sasaran strategis merupakan unsur strategi yang sangat vital karena pencapaian tujuan dasar dan sasaran strategis ini merupakan acuan yang menjadi dasar pengukuran berhasil atau tidaknya suatu strategi. Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika ini, manajemen organisasi harus dituntut untuk dapat menciptakan organisasi yang dapat mengembangkan strategi secara efektif yang antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan baru guna mencapai dan mempertahankan posisi bersaingnya. Strategi yang antisipatif sendiri merupakan fungsi keputusan yang menghubungkan lingkungan tempat organisasi

melakukan kegiatan, sumber-sumber daya yang dimiliki yang siap melayani, serta harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Maka untuk menjadikan suatu daerah menjadi daerah perindustrian andalan diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya intropeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor perindustrian maka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor perindustrian daerah kedepannya.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pada studi penelitian difokuskan untuk menganalisa dan menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh dalam pengembangan perindustrian daerah Kabupaten Bantaeng ditinjau dari sektor strategi dengan Judul: ***“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas maka dalam studi penelitian ini diharapkan untuk mencapai tujuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka studi penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng (KIBA) baik secara internal maupun eksternal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka mamfaat studi penelitian ini diarahkan untuk mencapai sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan tentang mekanisme penyusunan strategi bagi organisasi pemerintah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi yang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, masukan dan rumusan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai upaya menentukan strategi serta arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan disektor perindustrian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep strategi Pemerintahan

Bagus (2009), mendefenisikan strategi sebagai garis arah atau cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, karena dalam tindakan mencapai tujuan, kekuatan dan kelemahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Lagi pula dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki akan lebih mudah untuk mengoptimalkannya. Sebaliknya jika kita mengenal kelemahan, kita akan bisa menghindari atau bahkan berusaha menciptakan kekuatan dari kelemahan tersebut.

Chadler dalam Craig dan Grant (1996:4), strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Menurut Andrew dalam Craig dan Grant (1996:5), strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu. Jika organisasi dapat mengambil keputusan yang optimal yang berkaitan dengan setiap pilihan yang dihadapinya, sementara setiap keputusan harus memperhitungkan keputusan lain yang akan dibuat sekarang dan yang akan datang, maka strategi tidak akan dibutuhkan (Craig dan Grant, 199:6).

Menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Ghoshal (2003) dalam buku *The Strategy Process*, menyajikan lima definisi strategi yaitu :

1. Strategi sebagai rencana

Strategi adalah rencana, semacam sadar dimaksudkan yang meliputi tindakan, pedoman (atau pedoman yang ditetapkan) untuk menangani situasi. Dengan definisi ini, strategi memiliki dua karakteristik penting yaitu mereka dibuat sebelum tindakan yang menerapkan, dan mereka dikembangkan secara sadar dan sengaja. Sebagai rencana, strategi berkaitan dengan bagaimana pemimpin mencoba untuk menetapkan arah untuk organisasi, untuk mengatur mereka pada tindakan yang telah ditentukan. Dalam mempelajari strategi sebagai rencana, kita harus entah bagaimana masuk kedalam pikiran strategi, untuk mencari tahu apa yang benar-benar dimaksudkan.

2. Strategi sebagai taktik

Sebagai taktik, strategi membawa kita kedalam wilayah persaingan langsung, dimana ancaman dan feints dan berbagai maneuver lain bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tempat ini proses pembentukan strategi dalam pengaturan yang paling dinamis, dengan gerakan memprovokasi dan seterusnya. Namun Ironisnya, strategi itu sendiri adalah sebuah konsep yang berakar tidak dalam perubahan tetapi dalam stabilitas dalam mengatur rencana dan pola didirikan.

3. Strategi sebagai pola

Tetapi jika strategi dapat dimaksudkan (apakah sebagai rencana umum atau khusus *plans*), tapi mereka juga dapat terwujud. Dengan kata lain, menentukan strategi sebagai rencana ini tidak cukup, kita juga perlu definisi yang meliputi perilaku yang dihasilkan. Dengan demikian, definisi ketiga diusulkan strategi adalah pola khususnya, pola dalam aliran tindakan (Mintzberg dan Waters, 1985 dalam Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal:2003). Menurut definisi ini, strategi adalah konsistensi dalam perilaku, apakah atau tidak dimaksudkan.

Hal ini mungkin terdengar aneh definisi untuk kata yang telah begitu terikat dengan kehendak bebas. Tetapi faktanya adalah bahwa sementara hampir tidak ada yang mendefinisikan strategi dalam cara ini, banyak orang tampak pada suatu waktu menggunakannya. Quinn (1980:35) dalam Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal (2003) mengatakan, pertimbangkan ini kutipan dari seorang eksekutif bisnis “Secara bertahap pendekatan yang sukses menggabungkan kedalam pola tindakan yang menjadi strategi kami. Kita tidak memiliki strategi keseluruhan”.

Komentar ini tidak konsisten hanya jika kita membatasi diri untuk salah satu definisi strategi, apa yang orang ini tampaknya katakan adalah bahwa perusahaan memiliki strategi sebagai pola, tapi bukan sebagai rencana.

Dengan demikian, definisi strategi sebagai rencana dan pola dapat cukup independen satu sama lain rencana saya belum direalisasi, sementara pola mungkin muncul tanpa prasangka. Sebagai pola, bertitik berat pada tindakan. Strategi sebagai pola juga memperkenalkan gagasan tentang konvergensi, pencapaian konsistensi dalam perilaku organisasi. Menyadari strategi yang

dimaksud mendorong kita untuk mempertimbangkan gagasan bahwa strategi dapat muncul serta sengaja dikenakan.

4. Strategi sebagai posisi

Definisi keempat adalah strategi sebagai posisi secara khusus, cara untuk menemukan sebuah organisasi, diteori organisasi suka menyebutnya lingkungan. Dengan definisi ini, strategi menjadi mediasi antara organisasi dan lingkungan dalam konteks internal dan eksternal. Definisi strategi sebagai posisi dapat kompatibel dengan baik (atau semua) dari yang sebelumnya, posisi dapat dicentang dan bercita-cita untuk memikirkan rencana (atau taktik) atau dapat dicapai, mungkin bahkan melalui pola perilaku.

Sebagai posisi, strategi ini mendorong kita untuk melihat organisasi dalam lingkungan kompetitif mereka, bagaimana mereka menemukan posisi mereka dan melindungi mereka untuk memenuhi persaingan, menghindarinya, atau menumbangkannya. Hal ini memungkinkan kita untuk berpikir organisasi secara ekologis, sebagai organisme dalam ceruk yang berjuang untuk bertahan hidup di dunia permusuhan dan ketidakpastian serta simbiosis.

5. Strategi sebagai perspektif

Sementara definisi keempat terlihat keluar, mencari untuk menemukan organisasi dalam lingkungan eksternal, dan turun keposisi kelima terlihat didalam organisasi, memang dalam kepala strategi kolektif, tetapi sampai dengan pandangan yang lebih luas. Disini, strategi adalah perspektif, bukan hanya terdiri dari posisi pilihan, tetapi cara yang tertanam memahami dunia.

Definisi kelima ini menunjukkan bahwa semua konsep strategi memiliki satu implikasi penting, yaitu bahwa semua strategi adalah abstraksi yang hanya ada dipikiran pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk diingat bahwa tidak ada yang pernah melihat atau menyentuh strategi, setiap strategi adalah sebuah penemuan, khayalan dari imajinasi seseorang, apakah dirumuskan sebagai niat untuk mengatur perilaku itu berlangsung atau disimpulkan sebagai pola untuk menggambarkan perilaku yang telah terjadi.

Sebagai perspektif, strategi menimbulkan pertanyaan menarik tentang niat dan perilaku dalam konteks kolektif. Jika kita mendefinisikan organisasi sebagai tindakan kolektif dalam mengejar misi umum, kemudian strategi sebagai perspektif memunculkan masalah bagaimana menyebar niat melalui sekelompok orang untuk menjadi bersama sebagai norma-norma dan nilai-nilai, dan bagaimana pola perilaku menjadi sangat tertanam dalam kelompok.

Seperti yang disarankan diatas, strategi sebagai posisi dan perspektif dapat kompatibel dengan strategi sebagai rencana atau pola. Tapi, pada kenyataannya, hubungan antara definisi yang berbeda ini bisa lebih terlibat, tapi konsep strategi yang muncul adalah bahwa pola yang dapat muncul dan diakui menimbulkan sebuah rencana resmi, mungkin dalam perspektif keseluruhan.

Sementara berbagai hubungan yang ada antara definisi yang berbeda, satu hubungan, atau satu definisi diutamakan dibanding yang lain. Dalam beberapa hal, definisi ini bersaing (dalam artian bahwa mereka dapat menggantikan satu sama lain), tetapi mungkin cara yang lebih penting, mereka saling melengkapi. Masing-masing definisi menambahkan elemen penting untuk pemahaman kita tentang

strategi, mendorong kita untuk mengatasi pertanyaan mendasar mengenai organisasi secara umum (Mintzberg, Lampel, Quinn,

Dalam merumuskan suatu strategi, manajemen puncak harus memperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritical, yaitu :

1. Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai. Yang jelas menonjol dalam faktor pertama ini ialah bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar.
2. Dalam merumuskan dan menetapkan strategi, manajemen puncak mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil dimaksud harus menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.
3. Pengenalan yang tentang lingkungan dengan mana organisasi akan berinteraksi, terutama situasi yang membawa suasana persaingan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh organisasi apabila organisasi yang bersangkutan ingin tidak hanya mampu melaksanakan eksistensinya, akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya.
4. Suatu strategi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta

ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Dengan analisis yang tepat berbagai alternatif yang dapat ditempuh akan terlihat.

5. Mengidentifikasi beberapa pilihan yang wajar ditelaah lebih lanjut dari berbagai alternatif yang tersedia dikaitkan dengan keseluruhan upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
6. Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang dipandang paling tepat dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai yang paling strategik dan diperhitungkan dapat dicapai karena didukung oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi.
7. Suatu sasaran jangka panjang pada umumnya mempunyai paling sedikit empat ciri yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang idealistik, jangkauan waktunya jauh ke masa depan, hanya bisa dinyatakan secara kualitatif, dan masih abstrak. Dengan cirri-ciri seperti itu, suatu strategi perlu memberikan arah tentang rincian yang perlu dilakukan. Artinya, perlu ditetapkan sasaran antara dengan ciri-ciri jangkauan waktu kedepan spesifik, praktis dalam arti diperkirakan mungkin dicapai, dinyatakan secara kuantitatif, dan bersifat konkret.
8. Memperhatikan pentingnya operasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi dibidang anggaran, sarana, prasarana, dan waktu.
9. Mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyaratan bukan hanya dalam arti kualifikasi teknis, akan tetapi juga berperilaku serta

mempersiapkan system manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dalam organisasi.

10. Teknologi yang akan dimanfaatkan yang karena peningkatan kecanggihannya memerlukan seleksi yang tepat.
11. Bentuk, tipe, dan struktur organisasi yang akan digunakan pun harus turut diperhitungkan, misalnya apakah akan mengikuti pola tradisional dalam arti menggunakan struktur yang hierarkiral dan piramidal, ataukah akan menggunakan struktur yang lebih datar dan mungkin berbentuk matriks.
12. Menciptakan suatu system pengawasan sedemikian rupa sehingga daya inovasi kreativitas dan diskresi para pelaksana kegiatan operasional tidak dipadamkan.
13. Sistem penilaian tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan strategi yang dilakukan berdasarkan serangkaian kriteria yang rasional dan objektif.
14. Menciptakan suatu sistem umpan balik sebagai instrument yang ampuh bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi yang telah ditentukan itu untuk mengetahui apakah sasaran terlampaui, hanya sekedar tercapai atau bahkan mungkin tidak tercapai. Kesemuanya ini diperlukan sebagai bahan dan dasar untuk mengambil keputusan di masa depan.

Dari pembahasan diatas kiranya jelas bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemilkian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif

dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan (Siagian 2003:16).

Menurut Craig dan Grant (1996:10), strategi yang berhasil adalah strategi yang berhasil mengombinasikan empat karakteristik utama, sebagai berikut:

1. Sasaran sederhana jangka panjang. Landasan setiap strategi organisasi harus merupakan kejelasan dari sasaran. Kalau tidak ada konsensus dan konsistem dari sasaran, strategi tidak dapat memberikan stabilitas dan kesatuan arah.
2. Melalui analisis lingkungan.
3. Penilaian sumber daya yang efektif.
4. Penerapan yang efektif. Strategi yang paling cemerlang tidak berguna jika tidak diterapkan secara efektif. Penerapan yang efektif memerlukan pembentukan kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem manajemen yang dapat memegang teguh komitmen dan koordinasi seluruh pegawai, dan mobilisasi sumber daya untuk melengkapi strategi tersebut.

pemerintahan berstrategi bukan sesuatu yang begitu saja bisa dengan mudah untuk diwujudkan. Menurut Mulgan dalam Muhammad (2013), karakteristik khas pemerintahan menjadikannya lebih mudah untuk diarahkan meraih hal-hal yang termasuk dalam kategori sedang-sedang saja. Tidak mudah berpikir panjang dan rasional, apalagi disertai dengan target dan kinerja yang luar biasa.

Jika politisi dan birokrat pemangku kekuasaan ternyata tidak memiliki waktu yang cukup panjang dalam memerintah, maka mereka akan cenderung menempatkan kepentingan mereka pada prioritas yang lebih tinggi dari

kepentingan publik (Mulgam dalam Muhammad, 2013). Dalam kalimat lain Muhammad (2013), mengatakan bahwa diperlukan rekayasa politik jika dikehendaki adanya pemerintahan yang memiliki orientasi strategis dengan persediaan energi yang melimpah dan tingkat kesabaran yang tinggi.

James Brian Quinn (mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal : 2003), analisis strategi militer diplomatik dan analogi-analogi yang serupa dalam bidang lain menyediakan beberapa wawasan penting kedalam dimensi dasar, sifat dan desain strategi formal.

Pertama, strategi efektif mengandung tiga unsur penting:

1) Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Tujuan merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya dimana ketika tujuan sudah ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

2) Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijaka lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi.

3) Program

Program merupakan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Strategi menentukan arah keseluruhan dan tindakan fokus organisasi, formulasinya tidak dapat dianggap sebagai generasi belaka dan keselarasan program untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan merupakan bagian integral dari strategi formulasi.

Kedua, strategi efektif mengembangkan beberapa konsep, kunci dan dorongan yang memberi mereka kohesi, keseimbangan, dan fokus. Beberapa tekanan bersifat sementara lain dilakukan melalui strategi tahap akhir. Sumber daya harus dialokasikan dalam pola-pola yang menyediakan sumber daya yang cukup untuk setiap dorongan untuk berhasil terlepas dari rasio biaya relatif/keuntungannya. Unit organisasi harus terkoordinasi dan tindakan-tindakan yang dikendalikan untuk mendukung pola dorong yang dimaksud atau strategi total.

Ketiga, strategi berkaitan tidak hanya dengan tak terduga, tetapi juga dengan tidak dapat diketahui. menurut Braybrooke dan Lindblom, (1963) (dalam Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal :2003) untuk strategi perusahaan, analisis tidak meramalkan cara yang tepat dimana semua kekuatan bisa berinteraksi satu sama lain, terdistorsi oleh sifat atau emosi manusia, atau dimodifikasi oleh imajinasi dan tujuan aksi balasan cerdas, tindakan rasional atau bagaimana rangkaian acara

yang tampaknya aneh dapat berkonspirasi untuk mencegah keberhasilan (White, 1978; Lindblom, 1959 dalam Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal :2003).

Keempat, hanya sebuah organisasi militer yang memiliki berbagai eselon grand, teater, daerah, pertempuran, infantri dan artileri strategi, jadi kompleks organisasi harus lain yang memiliki sejumlah hirarki terkait dan saling mendukung strategi (Vancil dan Lorange, 1975 (dalam Minzberg, lampel, Quinn, Ghoshal :2003).setiap strategi harus lebih atau kurang lengkap dalam dirinya sendiri, selaras dengan tingkat desentralisasi yang dimaksud. Namun masing-masing harus dibentuk sebagai elemen kohesif tingkat strategi yang lebih tinggi. Meskipun, mencapai kohesi antara semua organisasi organisasi yang besar, strategi akan menjadi tugas yang luar biasa untuk setiap petugas kepala *executive*, sangat penting bahwa ada satu wadah yang sistematis untuk pengujian setiap komponen strategi dan melihat bahwa itu memenuhi prinsip-prinsip utama dari strategi dibentuk (Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal :2003).

Moore dalam Muhammad (2013), manajer publik merupakan manajer strategi, bukan sekedar teknisi. Ada tiga komponen sebagai penguji efektivitas peran strategis manajer publik, yaitu:

1. *Publik value outcomes*, menunjuk pada elemen baru dalam manajemen publik yang membedakannya dengan administrasi publik klasik.
2. *Authorizing environment*, memiliki karakter lebih politik, yang berhubungan dengan legitimasi eksistensial organisasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya.

3. *Operationa lcapacity*, memiliki karakter lebih sebagai manajemen.

Wechsler dan Backoff dalam Muhammad (2013) mendeskripsikan empat tipologi strategi yang dikenal dengan tipologi model W-B:

1. Strategi pengembangan

Suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda dimasa depan. Bryson dalam Muhammad (2013) menambahkan bahwa strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik.

2. Strategi transformasi

Dikatakan sebagai strategi transformasi ketika komitmen pokok organisasi diarahkan untuk menghsilkan perubahan fundamental. Pada umumnya, pilihan pada strategi ini dipengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan di luar organisasi. Tak jarang arah strategis organisasi kemudian lebih dekat dengan tuntutan yang datang dari luar dibanding dengan aspirasi yang berkembang di dalam organisasi.

3. Strategi protektif

Strategi protektif lahir karena adanya potensi ancaman yang berasal dari lingkungan luar organisasi, dan disaat yang sama, kapasitas organisasi yang dimiliki semakin terbatas. Dengan demikian, strategi ini pada dasarnya berusaha mengakomodasi pengaruh negatif yang begitu besar yang datang dari luar sembari mempertahankan *status quo* organisasi. Sebisa mungkin

posisi ekonomi politik organisasi dijaga agar tidak menurun secara tajam. Eksekusi strategi di dalam organisasi lebih banyak dilakukan berdasarkan pertimbangan politik dan hubungan personal dibanding pertimbangan objektif organisatoris.

4. Strategi politik

Strategi politik memiliki setidaknya wajah ganda. Kemungkinan pertama, strategi politik terlihat ketika esensi strategi lebih ditujukan untuk melakukan akomodasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang berasal dari luar organisasi, dan disaat yang sama diarahkan untuk membatasi tekanan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Wajah lain terlihat ketika strategi organisasi digunakan sebagai alat oleh partisan politik dalam organisasi dan dijadikan dasar untuk memberikan ganjaran dan *reward* pada pendukung masing-masing.

Dimensi Strategi

B. Konsep Kawasan Industri

Menurut National Industrial Zoning Committee's United States Of America (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastruktur (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Definisi lain, menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI (The Urban Land Institute), Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu

daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya.

Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas *industrial estates*. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “lingkungan industri”.

Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunakan istilah kawasan industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, belum mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, Zona atau Kawasan industri. Pasal 14 UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat (1) huruf (e) Pasal 14 UUPA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah “kawasan Industri”. Istilah yang digunakan UU Nomor 5/1984 dalam pengaturan untuk suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.

Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu kepada keputusan presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996. Menurut Keppres tersebut, yang

dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki kawasan industri. Menurut Marsudi Djodipuro, kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan.
2. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
3. Ada suatu badan (manajemen) pengelola.
4. Memiliki izin usaha kawasan industri.
5. Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri”, “Zona Industri”, dan ”Cluster Industri”. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. Cluster Industri adalah pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

C. Pendekatan Pengembangan Kawasan Industri

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka sejak saat itu di Indonesia telah perubahan yang gradual dalam konsep pembangunan nasional, perubahan paradigma pembangunan setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan seluruh sumber daya, dan aspek kelembagaannya. dalam hal aspek perencanaan, khususnya, telah terjadi perubahan pendekatan dari yang bersifat *top-down* menjadi bersifat *bottom-up*. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional, selain tetap harus dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, juga akan memberikan konsekuensi lebih berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Artinya, daerah atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya dan sumber dana secara optimal.

Dengan demikian, daerah akan memutuskan sendiri pola dan bentuk kawasan yang akan diandalkan untuk dikembangkannya, maupun sektor atau produk-produk potensi daerah yang akan diunggulkannya untuk mendukung

pembangunan daerah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik tersebut diatas juga akan memberikan akan member implikasi bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola seluruh sumber dana untuk membiyai pembangunan daerahnya. Peran pemerintah pusat yang semula bersifat sektoral secara bertahap beralih ke pemeintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dengan pendekatan regional yang bersifat lintas sektoral. Dalam hal ini, kelembagaan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah akan semakin penting dan diakui keberadaannya. Desentralisasi menuntut pembangunan di kelola berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Masyarakat atau rakyat sebagai pelaku utama dalam pengeloaan dan pengambilan manfaatnya.
2. Masyarakat atau rakyat sebagai pengambil keputusan dan penentuan sistem perusahaan dan pengelolaan yang tepat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kebijakan.
4. Kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
5. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat atau rakyat
6. Pendekatan perusahaan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keaneka ragaman budaya.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka kewenangan dan kewajiban pengembangan kawasan, sekarang ini berada pada pemerintah kabupaten/kota. Peran pemerintah pusat adalah penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria, disamping memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah. Sedangkan

kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kawasan adalah sangat luas, antara lain adalah:

1. Menetapkan target pertumbuhan.
2. Menetapkan tahap dan langkah pembagunan kawasan dan kedaerahan, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
3. Menetapkan persetujuan kerja sama regional dibidang perdagangan yang berlandaskan pada produksi lokal yang dihasilkan oleh sentra-sentra komoditas tertentu.
4. Melakukan berbagai macam negosiasi yang bertujuan mewujudkan konsepsi pertumbuhan ekonomi regional.
5. Menetapkan institusi-institusi pendukung kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi regional
6. Mengembangkan system informasi untuk promosi kegiatan-kegiatan ekonomi regional.

D. Tujuan Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*sosial system*, lingkungan hidup beserta sumber daya alam (*ecosystem*)). Setiap system memiliki tujuan masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan kawasan industri ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya.
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan konservasi sumber daya alam demi kesinambungan daerah
6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan industri di laksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan disetiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keberagaman sumber daya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal.
5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
6. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.

7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, selain tujuan-tujuan tersebut, dipandang dari segi kepentingan daerah, pengembangan kawasan industri diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan.
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat.
5. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

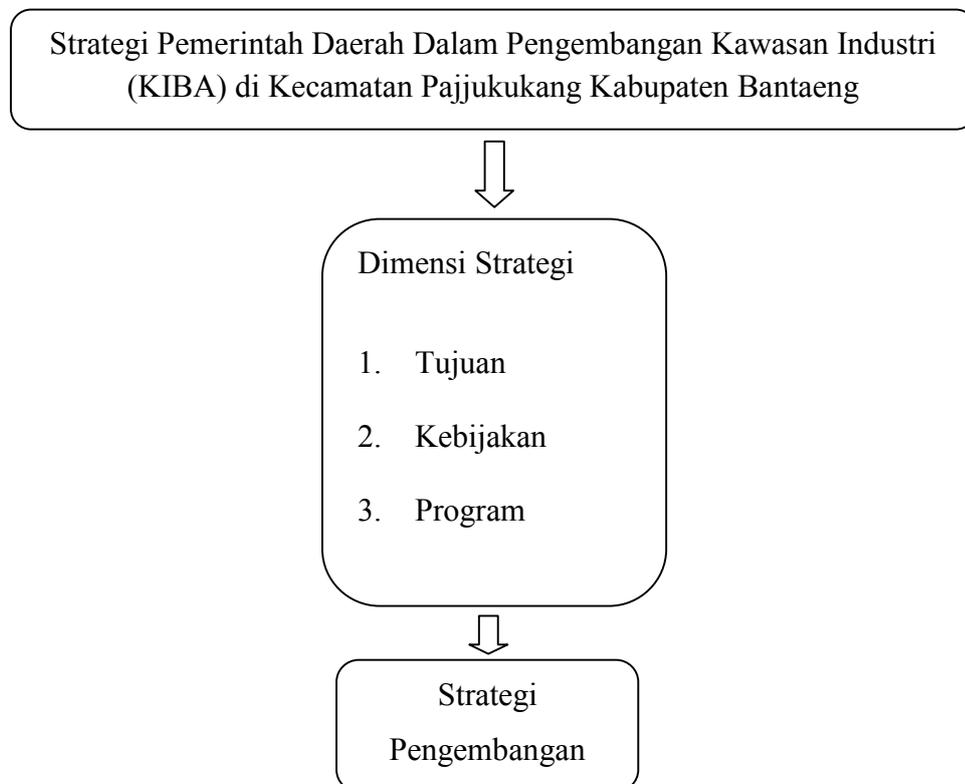
Terkait pengembangan tersebut, maka dimasa mendatang, diharapkan akan tercapai kawasan pengembangan industri yang berhasil, dengan kriteria-kriteria antara lain :

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah.
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun dikawasan sekitarnya.
3. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun kebelakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.

E. Kerangka Pikir

Sehubungan dengan relevansi pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai di sektor industri secara nasional, maka seyogyanya jika mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng memerlukan strategi yang handal, dan bagaimana strategi tersebut diimplementasikan. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pajjukukang dengan menggambarkan dimensi-dimensi strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



F. Deskripsi fokus penelitian

Strategi pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta visi, misi, dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng. Objek yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah objek Kawasan Industri Bantaeng dengan menggunakan beberapa dimensi strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshaldala buku *The Strategy Process* yaitu:

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Tujuan merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya dimana ketika tujuan sudah ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijaka lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi.

Program merupakan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama lebih dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dengan pertimbangan bahwa strategi Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tidak efektif dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajjukukang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (2001), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam hal ini strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajjukukang selama penelitian.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan, tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan kawasan industri.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan kawasan industri dan beberapa masyarakat yang ada dalam kawasan industri tersebut.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng. Adapun informan tersebut adalah:

Tabel 1 . Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Muh. Yasin	MY	Wakil Bupati Bantaeng	1
2.	A. Ali Mappatoba	AAM	Kepala Dinas	1
3.	Natsharanti	NS	Kasubid program dan keuangan	1
4.	Iffah Rafida Djafar	IRD	Kasubid Perindustrian	1
5.	Muh. Rusdi Maksud	MRM	Kasubid Hubungan Industrial	1

6.	A. Lukman Agung	ALA	Seksi Industri Logam	1
7.	H. Yodan	HY	Sekretaris Kecamatan	1
8.	Saeful	SA	masyarakat	1
Jumlah				8

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten dalam badan (lembaga) tersebut maupun pihak-pihak terkait lainnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian mengenai Strategi

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pajjukukang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014)

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), dalam pengujian pengabsahan data, metode penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian

kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji *Credibility*

Dalam bukunya, Sugiyono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelengkapan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi disembunyikan lagi (Sugiyono, 2012).

b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data (Sugiyono, 2012)

c. Triangulasi

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2012) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul (Sugiyono, 2012)

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2012).

f. Mengadakan *memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah didapat sehingga dapat memutuskan atau tidaknya hasil penelitian diaplikasikan di tempat lain (Sugiyono, 2012). Sanafiah Faizal (dalam Sugiyono, 2012) menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Pengujian *Dependability*

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif adalah uji *dependability* yang dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Sanafiah Faizal menyatakan bahwa jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangan” maka dependabilitas penelitiannya dapat diragukan (dalam Sugiyono, 2012).

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif adalah uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menurut Sugiyono (2014: 274), ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara antara apa yang dikatakan secara pribadi dan secara umum, dalam perbandingan ini peneliti mendapat dua pendapat yang berbeda sehingga peneliti kemudian melakukan perbandingan kembali antara apa yang dikatakan secara umum dan apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi lapangan, dalam perbandingan kali ini peneliti sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan Kawasan industri sudah baik, hanya dalam menjalankan strategi tersebut kurang efektif, hal ini berdasarkan perbandingan antara beberapa sumber yang diperoleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti kemudian menguji kredibilitas data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan, pada bagian ini peneliti terlibat langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat, setelah pengujian ini peneliti sudah dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang dikatakan secara pribadi dan umum itu sudah benar, strategi pengembangan kawasan industri sudah cukup baik hanya dalam mengimplementasikan strategi tersebut belum efektif.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, peneliti melakukan wawancara dipagi hari disaat informan masih segar serta peneliti juga beberapa kali melakukan perbincangan (wawancara) dengan salah satu informan di malam hari yang dilakukan di rumah informan tersebut, hal ini sebenarnya informan tidak menyadari bahwa peneliti sedang melakukan wawancara karena kedatangan peneliti dianggap sebagai tamu bukan peneliti, serta peneliti juga tidak mengajukan pertanyaan ke informan akan tetapi mengarahkan informan untuk melakukan cerita panjang tentang apa yang ingin diperoleh peneliti, dengan teknik ini peneliti dapat mendapatkan data yang lebih kredibel.

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kapastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Butta Toa terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng ini mempunyai luas wilayah 395,83 km². terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 67 Desa dan Kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT).

Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pajjukukang, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarangeke dan Kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompo Bulu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 76,99 km², sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km².

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai kepegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan provinsi selatan yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- c. Sebelah Selatan : Laut Flores

d. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Curah hujan di Kabupaten Bantaeng hampir merata disetiap bulan dalam setahun, jumlah hari hujan berdasarkan data tahun 2012 mencapai rata-rata 4,42 hari perbulan dengan jumlah hari hujan, dalam setahun sebanyak 53 hari dalam setahun, sedangkan curah hujan dalam setahun mencapai sebesar 169,33mm

Untuk periode tahun 2007-2011 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan meningkat, secara umum mengindikasikan pergerakan ekonomi daerah dari aktivitas penduduk disektor rill cenderung meningkat dari tahun ketahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantaeng mencapai diatas 2,40% jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan yang hanya mencapai sebesar 1,57% (BPS Sulsel,2012).

Permasalahan penyajian data jumlah penduduk selama ini, terdapat kecenderungan perbedaan antar jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2012 berjumlah sebanyak 185,675 jiwa atau lebih tinggi dibanding data BPS yang hanya berjumlah 185,675 jiwa yang terdiri atas 86.950 jiwa penduduk laki-laki dan 92.555 jiwa penduduk perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 453 jiwa pada tahun 2012. Berikut tabel perkembangan jumlah penduduk masing-masing kecamatan SeKabupaten Bantaeng Tahun 2008-2012 :

Tabel 3. Perkembangan Penduduk

No	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bantaeng	35.913	36.191	36.718	37.08	37.301
2	Bissappu	30.254	30.487	30.931	31.24	31.422
3	Tompobulu	22.422	22.591	22.913	23.14	23.177
4	Uluere	10.576	10.657	10.814	10.92	10.986
5	Sinoa	11.568	11.658	11.827	11.94	12.014
6	Pa'jukukang	28.379	28.599	29.017	29.30	29.478
7	Gantarangeke	15.524	15.865	15.865	16.02	16.117
8	Eremerasa	18.213	18.351	18.614	18.80	18.910
Jumlah		172.849	174.176	176.699	178.477	179.505

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2013

Sedangkan dari sisi struktur umur penduduk yang menggambarkan secara umum tentang hakikat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat ketergantungan penduduk. Dikemukakan bahwa persentase jumlah penduduk umur 25-64 tahun atau disebut dengan usia produktif sebesar 68,03% dan mereka yang berumur 65 tahun sebesar 5,07%. Mereka yang berusia 0-14 tahun dan 65 keatas disebut dengan usia tidak produktif, karena secara ekonomi kedua kelompok umur tersebut belum dan tidak lagi. Apabila penduduk yang tergolong usia produktif dibandingkan dengan mereka yang tergolong usia tidak produktif maka diperoleh tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, untuk periode tahun 2008-2012 sebaran penduduk Kabupaten Bantaeng jika diklasifikasi berdasarkan tingkat

pendidikan yang berasal dari data Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tidak/Belum sekolah	58.563	59.094	61.868	61.868	64.822
2	Belum Tamat SD	27.520	27.779	27.84	28.211	28.249
3	SD	47.123	47.493	48.07	15.877	16.331
4	SMP/Sederajat	15.354	15.545	15.76	15.877	16.331
5	SMA/Sederajat	19.297	19.569	19.852	20.021	20.403
6	Diploma	2.724	2.764	2.802	2.831	2.911
7	SI	4.490	4.585	4.616	4.691	4.710
8	SII	190	19	19	19	202
9	SIII	11	8	2	2	14

Sumber : Dinas kependudukan dan catatan Sipil, 2013

B. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng adalah instansi teknis yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang menaungi sektor perindustrian sesuai dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.

a. Visi dan Misi

Adapun Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng yaitu : “menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sejahtera serta mewujudkan usaha industri yang maju dan berkembang”.

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memperkuat peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pencapaian visi;
2. Mewujudkan tenaga kerja berkualitas dan produktif serta mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan guna meningkatkan kesempatan kerja;
3. Menciptakan hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan pekerja;
4. Mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk mengembangka industri daerah.

b. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng. Maka tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng adalah menyelenggarakan urusan dibidang tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng mempunyai fungsi :

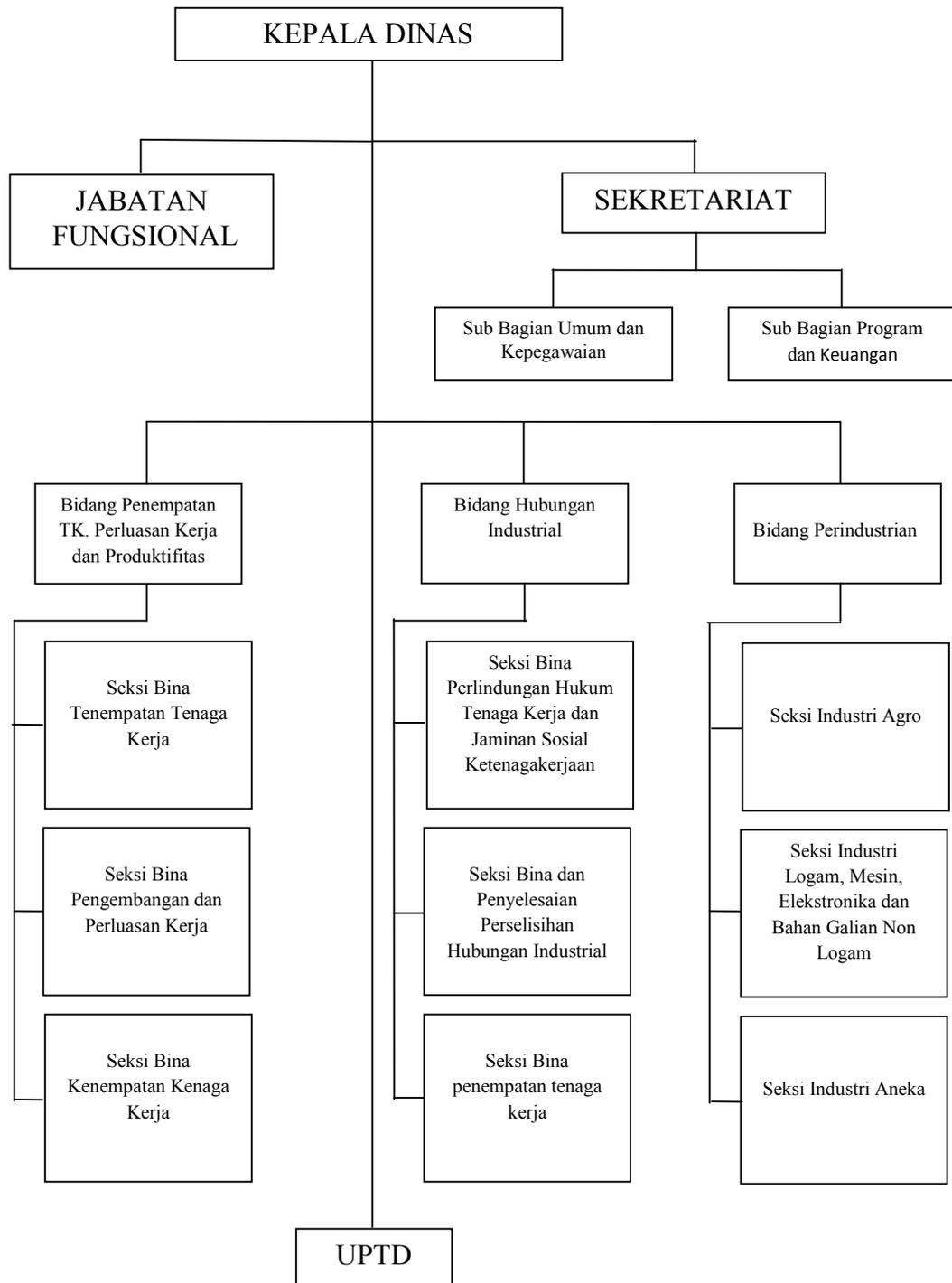
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian meliputi pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau sesuai dengan potensi daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perindustrian dan tenaga kerja, meliputi industri agro, industri non agro, tenaga kerja, pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau sesuai dengan potensi daerah;
 4. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja meliputi penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau sesuai dengan potensi daerah.
- d. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang penempatan tk. perluasan kesempatan kerja dan produktivitas:
 1. Seksi bina penempatan tenaga kerja
 2. Seksi bina pengembangan dan perluasan

3. Seksi bina pelatihan dan produktivitas
- d. Bidang hubungan industrial (HI) dan syarat kerja:
 1. Seksi bina organisasi pekerja dan pengusaha
 2. Seksi bina dan penyelesaian perselisihan HI
 3. Seksi bina perlindungan HK dan jamsostek
 - e. Bidang perindustrian:
 1. Seksi industri agro
 2. Seksi industri loga, mesin elektronika dan bahan galian non logam
 3. Seksi industri aneka
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



e. Sumber daya SKPD

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, dibidang ketenaga kerjaan berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 5. jumlah pegawai dibidang ketenagakerjaan

No.	Pangkat	Golongan	jumlah
1	Pembina /IV .a	IV.a	2 Orang
2	Penata Tk. I	III.D	5 Orang
3	Penata	III.C	1 orang
4	Penata Muda Tk. I	III.b	1 orang
5	Pengatur	II.c	1 orang
6	Pengatur muda	II.a	1 orang
Jumlah			11 orang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai pada dinas tenaga kerja dan perindustrian dibidang ketenagakerjaan sebanyak 11 orang berdasarkan pangkat dan golongan dan 15 pegawai honorer (Non PNS) yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada dibidang ketenagakerjaan. Jadi jumlah pegawai pada dinas tenaga kerja dan perindustrian dibidang ketenagakerjaan secara keseluruhan sebanyak 24 orang.

Adapun jumlah pegawai pada prindustrian berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah pegawai dibidang perindustrian

No.	Pangkat	Golongan	jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1 orang
2	Pembina Tk. I	IV.b	1 orang
3	Penata Tk. I	III.d	1 orang
4	Penata	III.c	3 orang
5	Penata Muda Tk. I	III.b	2 orang
6	Penata Muda	III.a	1 orang
7	Pengatur	II.c	1 orang
8	Pengatur Muda	II.b	1 orang
9	Pengatur Muda	II.a	1 orang
Jumlah			12 orang

Berdasarkan tabel, diatas jumlah pegawai pada dinas tenaga kerja dan perindustrian dibidang perindustrian sebanyak 12 orang berdasarkan pangkat dan golongan dan 21 orang pegawai honorer (Non PNS) yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada dibidang perindustrian. Jadi jumlah pegawai pada dinas tenaga kerja dan perindustrian dibidang perindustrian secara keseluruhan sebanyak 23 orang.

Dari kedua tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian kabupaten Bantaeng sebanyak 23 orang dan 36 orang pegawai honorer (Non PNS) yang mendukung setiap program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan perindustrian Kabupaten Bantaeng.

:

C. Profil Kawasan Industri Bantaeng

a. Gambaran umum Kawasan Industri Bantaeng

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 terutama terkait peruntukan kawasan industri besar adalah terletak dikecamatan Pa'jukukang. Seiring dinamika perkembangan rencana kawasan industri membutuhkan lahan yang cukup luas yaitu sekitar 3.055 ha meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke.

Kawasan industri Bantaeng terletak di Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke dengan lokasi geografis $120^{\circ}01'08''\text{BT}-05^{\circ}33'30''\text{LS}$ kawasan ini merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui jalur darat. Adapun cakupan administrasi Kawasan Industri Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pa'jukukang

- a. Desa Pa'jukang,
- b. Desa Papan Loe
- c. Desa Borong loe dan
- d. Desa Baruga

2. Kecamatan Gantarangkeke yaitu Desa Layoa

b. Kondisi fisik dasar

1. Topografi

Bentangan tofografi wilayah perencanaan berupa pantai 0 meter sampai dengan wilayah agak landai dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut

wilayah datar sampai gelombang yang merupakan wilayah potensial untuk pengembangan kawasan budidaya. Adapun jika mengacu pada peta RTRW Kabupaten Bantaeng, maka kelas kemiringan pada wilayah perencanaan terdiri dari :

- a) Kelas kemiringan 0-2% meliputi sebagian besar wilayah perencanaan pada bagian selatan yaitu wilayah pesisir pantai.
- b) Kelas kemiringan 2-8% meliputi sebagian kecil wilayah perencanaan pada bagian utara.

Adapun untuk kelas ketinggian adalah sebagai berikut

- c) Kelas ketinggian 0-25 meter meliputi wilayah perencanaan pada bagian selatan yaitu bagian selatan pesisir pantai.
- d) Kelas ketinggian 25-100 meter meliputi wilayah perencanaan pada bagian utara.

2. Kondisi geologi dan tanah

Karakteristik batuan di wilayah perencanaan bersifat homogen yaitu breksi, lahar, dan tufa. Adapun untuk jenis tanahnya adalah mediteran dan regosol coklat-kelabu.

Profil jenis tanah Mediteran :

- a) Proses terbentuknya : hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen.
- b) Ciri-ciri : warna putih kecoklatan, keras, tidak subur.
- c) Pemanfaatannya : untuk pertanian tegalan, hutan jati.

Profil jenis tanah Regosol

- a) Proses terbentuknya : endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar.
- b) Ciri-ciri : berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning dan kadar bahan organik rendah.
- c) Pemanfaatannya : untuk pertanian padi, palawija, tebu dan kelapa.

3. Klimatologi

Temperatur udara rata-rata berkisar antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $35,4^{\circ}\text{C}$, temperatur maksimum tertinggi terjadi pada bulan oktober dan desember yaitu mencapai $35,4^{\circ}\text{C}$, sedangkan temperatur minimum terendah terjadi pada bulan agustus yaitu $20,2^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kelembaban udara sekitar 79,9% dan intensitas matahari sekitar 54,5%. Adapun untuk kondisi curah hujan adalah 1.000-1.500 mm/tahun.

4. Hidrologi

Di Kabupaten Bantaeng terdapat beberapa aliran sungai besar dan kecil yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan berfungsi sebagai drainase. Sungai biangloe mempunyai sumber mata air dan gunung Lompobattang mengalir menyusuri Desa Kampala dan Desa Barua yang bermuara ke laut Flores. Debit air sungai Biangloe pada kondisi musim kemarau yang berkisar antara $2,5-4 \text{ m}^3$ perdetik dan pada saat kondisi normal biasanya mencapai 15-20 m^3 perdetik. Sungai biangloe telah dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber air baku dengan debit sebesar 20 l/detik.

Sebagai daerah dengan luas yang relatif terbatas atau hanya kurang lebih 0,8 dari luas Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Bantaeng hanya

memiliki 11 sungai yang melintas beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai sungai dimaksud antara lain:

Tabel 2. Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang dilintasi

No	Nama sungai	Panjang	Kecamatan dilintasi
1	Pamosa	1,7	Pajukukang
2	Turung Asu	7,4	Tompobulu, Gantarangkeke
3	Balang Sikuyu	10,8	Uluere, Sinoa, Bissappu
4	Panaikang	11,7	Uluere, Sinoa, Bissappu
5	Kalamassang	14,2	Tompobulu, Gantarangkeke
6	Lemoa	14,4	Uluere, Bissappu
7	Kaloling	17,1	Tompobulu, Gantarangkeke
8	Biangkeke	20,4	Tompobulu, Gantarangkeke
9	Calendu	20,7	Uluere, Bantaeng
10	Bialo	43,3	Uluere, Tompo bulu
11	Nipa-Nipa	25,1	Tompobulu, Gantarangkeke

Sumber : Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng.

Dari beberapa aliran sungai tersebut tiga di antaranya sebagai pengendali banjir dan berfungsi sebagai drainase yaitu sungai Biangloe, Sungai Calendu dan Sungai Garegea.

D. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang mengalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam hal ini strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng yang berfokus pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenaga kerjaan dan perindustrian.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan penulis akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas dalam kerangka pikir terkait dimensi strategi yaitu Tujuan, kebijakan, dan program yang menghasilkan suatu strategi yakni sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil ingin dicapai suatu organisasi/instansi. Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan tenaga kerja dan perindustrian pada bidang-bidang strategis. Tujuan pembanguna tenaga kerja dan perindustrian kabupaten Bantaeng menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan pembangunan tenaga kerja dan perindustrian Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kawasan industri adalah sebgai berikut :

Tujuan

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi;
2. Menciptakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
3. Meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja;
4. Meminimalisir angka perselisihan industrial antara pengusaha dan pekerja;
5. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah.

Sasaran organisasi adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik.

Sasaran pembangunan jangka menengah Tenaga Kerja dan perindustrian dalam pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya operasional perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD);
2. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, bersertifikat dan siap pakai;
3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
4. Tumbuhnya hasil industri yang berbasis bahan baku lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Pada dasarnya tujuan pengembangan setiap kawasan Industri yang ada di kabupaten Bantaeng khususnya kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang

memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemerintah, investor dan terutama warga/masyarakat kabupaten Bantaeng. Dengan pengembangan yang dilakukan memberikan manfaat yang sangat besar terutama masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan. Hal ini diutarakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian yang menyatakan :

“sesungguhnya ketika kawasan industri dikembangkan maka perekonomian masyarakat kecil yang bergerak karena dengan hadirnya industri ini masyarakat setempat bisa bekerja di industri tersebut utamanya bagi pemuda yang menganggur.” (wawancara dengan AAM, 16 Juli 2017)

Kepala sub bagian perindustrian juga menambahkan tentang tujuan pengembangan kawasan industri:

“tujuan dari pengembangan kawasan indsutri yang berada di Kecamatan Pa’jukukang itu adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat.” (wawancara dengan IRD, 17 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas, pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pengembangan kawasan industri dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat kecil dan dapat mengurangi angka pengangguran sehigga pengembangan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi pemerintah, investor, dan terutama masyarakat kecil dimana mereka dapat menumbuhkan pendapatan perekonomian mereka. .

Dalam hal pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa’jukukang, akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan seiring dengan pengembangan kawasan industri dilakukan, maka secara otomatis pelayanan

administrasi dan sarana dan prasarana perindustrian ditingkatkan guna menarik investor untuk menanamkan modal dikawasan industri tersebut

Dengan usaha pengembangan kawasan industri tersebut diatas maka sesuai dengan harapan akan membantu perekonomian masyarakat juga sangat membantu usaha-usaha kecil, seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris kecamatan Pa'jukukang, berikut kutipan wawancara dari informan :

“seperti yang kita ketahui bahwa kehadiran kawasan industri dikecamatan ini yang luasnya mencapai kurang lebih 3.000 ha, ini sangat menunjang usaha kecil baik usaha kecil diluar dari kecamatan Pa'jukukang maupun di Kecamatan Pa'jukukang itu sendiri.” (wawancara dengan HY, 25 Juli 2017)

Salah satu masyarakat Kecamatan Pa'jukukang, Desa Papanloe, mengungkapkan hal yang serupa, berikut hasil wawancara dari informan :

“tidak bisa dipungkiri bahwa dengan hadirnya Kawasan industri dikampung kami sangat membantu usaha orang tua saya yaitu usaha produksi batu merah yang terbuat dari tanah liat.” (wawancara dengan SA, 26 juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas, tujuan pengembangan kawasan industri di Kecamatan tersebut bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, akan tetapi kehadiran industri ini juga membantu usaha-usaha kecil masyarakat seperti pembuatan Batu merah.

2. Kebijakan

Kebijaklann adalah rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. penyusunan kebijakan dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng tentunya harus berdasarkan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penentu arah kebijakan dari pelaksanaan

proses pengembangan kawasan industri, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh wakil bupati. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“jadi kebijakan dalam kawasan industri di Bantaeng ini dek, tentunya harus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2015-2019 kabupaten itu masuk 14 kawasan strategis yang harus dipercepat pengembangannya, kawasan diantaranya itu adalah Smelter untuk Kabupaten Bantaeng yang diutamakan, kenapa smelter yang diutamakan itu karena ini salah satu alternatif untuk mendongkrak pendapatan daerah.”(wawancara dengan MY, 22 Juli 2017)

Demikian kutipan hasil wawancara dengan MY sebagai Wakil Bupati Bantaeng, yang mengungkapkan Bahwa undang-undang dan peraturan yang memuat tentang kawasan industri pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kawasan industri harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dasar hukum pelaksanaan pengembangan kawasan industri yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, pasal 14 ayat (1) pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia melalui perwilayahan industri; (2) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional; c. peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai; (3) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui: a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri; b. pengembangan kawasan peruntukan industri; c. pembangunan kawasan industri; dan d. pengembangan sentra industri

kecil dan industri menengah. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri; peraturan menteri perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang pedoman teknis kawasan industri; peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2015-2019; dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.

Dari beberapa dasar hukum diatas pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menuturkan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng :

“terkait dengan kebijakan pemerintah Bantaeng kami sudah merancang yang pastinya mengacu dari beberapa peraturan pemerintah pusat, jadi kawasan yang luasnya tiga ribu hektar (3000 ha) itu sampai hari ini masih dalam berbentuk surat Keputusan (SK) Bupati, didalamnya sudah ada kita buat rencana tata ruang kawasan yakni peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang menyebutkan Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang.” (wawancara dengan AAM, 16 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas mengungkapkan beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai arahan pengembangan kawasan industri Bantaeng yakni peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng, menyebutkan kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang. Dengan hadirnya peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 sebagai

acuan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam proses pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng.

Dari beberapa kebijakan tersebut maka sepatutnyalah Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian menyusun suatu kebijakan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah sebagai arah kebijakan dalam proses pengembangan kawasan industri.

Adapun kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah :

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Program peningkatan kesempatan kerja;
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program peningkatan Teknologi industri;
6. Program peningkatan struktur industri
7. Program dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan industri.

Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam pengembangan kawasan industri yang tentunya harus berpedoman atas kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai penentu arah dari pelaksanaan pengembangan kawasan industri. Berikut kutipan wawancara dengan informan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri:

“jadi kawasan industri ini skala prioritas, visi Bantaeng sendiri yaitu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dibagian Selatan Sulawesi, memang sudah jelas bahwa pengembangan kawasan industri yang ada di Kecamatan Pa’jukukang salah satu bentuk mewujudkan Kabupaten Bantaeng.” (wawancara dengan IRD, 17 Juli 2017)

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga ditambahkan Kepala sub bagian ketenagakerjaan untuk pengembangan kawasan industri Pa’jukukang yang mengatakan :

“kebijakan yang kita lakukan untuk pengembangan kawasan industri antara lain meningkatkan Kualitas SDM Industri dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang biasa disebut diklat, baik dalam negeri maupun diluar negeri.” (wawancara dengan MIB, 21 Juli 2017)

Selanjutnya beliau menambahkan :

“Jadi dalam pengembangan kawasan industri ini kami terkonsentrasi pada satu titik fokus, karena sesuatu yang dibangun tanpa fokus itu tidak akan terlihat hasilnya”. (wawancara dengan MIB, 21 Juli 2017)

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa’jukukang telah berjalan sesuai rencana. Salah satu dari kebijakan itu seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten yang pembangunannya dalam proses perkembangan dalam hal ekonomi dan industri. Dalam hal perindustrian, Bantaeng dalam proses perkembangan. Dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang, Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kabupaten Bantaeng telah menjalankan beberapa kebijakan pengembangan kawasan industri secara bertahap pengembangan kawasan industri yang berada di Kecamatan Pa’jukukang.

3. Program

program adalah berupa urutan-urutan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam bidang perindustrian adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan.
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan.
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - j. Fasilitasi pelayanan administrasi kesekretariatan/tata usaha.

Dari beberapa sub program diatas, Sub bagian program dan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga menambahkan, berikut wawancara dari informan :

“jadi terkait pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa’jukukang, tentunya kita disini harus melakukan pembenahan sebagaimana program-program yang telah kita rencanakan yang sesuai kebutuhan instansi ini.”
(wawancara dengan NS, 29 mei 2018)

Dari wawancara diatas, pembenahan yang dimaksud adalah pembenahan yang dilakukan menyangkut jasa pengembangan kawasan industri Bantaeng di

Kecamatan Pa'jukukang. Sebelum melakukan pembenahan, tentunya pemerintah melakukan analisis terhadap kawasan industri yang ada di Kecamatan Pa'jukukang. Analisis ini dilakukan agar mengetahui hal apa yang kurang dalam pengembangan kawasan industri tersebut.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Dalam program ini hanya satu kegiatan yang dilakukan yakni pemeliharaan rutin berskala gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian seperti pengecatan pagar dan dinding bangunan gedung kantor.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan.

- a. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- b. Laporan keuangan akhir Tahun.

4. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. Dalam program ini Kepala sub bagian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menambahkan, berikut wawancara dari informan :

“dalam program ini kami telah melakukan beberapa kegiatan salah satunya adalah penguatan kemampuan industri berberbasis teknologi, dikegiatan ini kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)”. (wawancara dengan MRM, 28 mei 2018)

Dalam pengembangan kawasan industri sangat penting pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai penunjang pengembangan kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.

5. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
 - a. Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri.

Pengembangan industri di Kabupaten Bantaeng Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengungkapkan :

“kami di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng hadir untuk kemudian memfasilitasi bagi industri kecil maupun industri menengah untuk kemudian mengembangkan industri yang ada. jadi kami tetap intens membangun relasi terhadap masyarakat maupun pemilik industri kecil melalui komunikasi”. (wawancara dengan AAM, 16 Juli 2017)

Hal serupa yang diungkapkan dengan kepala sub bagian prindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, berikut wawancara dari informan :

“dalam pengembangan Kawasan Industri ini kegiatan yang kami lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah pengadaan sarana dan prasarana penunjang dan pekerjaan pelataran/halaman pusat promosi dan ruang pameran sentra industri. Disisi lain kami juga melakukan pembinaan terhadap industri kecil dalam memperkuat jaringan Kluster industri.”(hasil wawancara dengan IRD, 17 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas, pemerintah Daerah kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, hadir sebagai fasilitator terhadap industri kecil yaitu itu pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dan pembinaan terhadap pekerjaan pengembangan kawasan industri.

6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yaitu peningkatan kemampuan teknologi industri dalam pengembangan kawasan industri dengan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur.

7. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Dalam program ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menambahkan, berikut wawancara dari informan:

“Dalam program ini kami melakukan kegiatan dalam gelar kerajinan Nasional daerah dan produk industri kreatif Nusantara pada tanggal 17 sampai tanggal 20 april 2017 yang bertempat bertempat di Four Points By Shearaton Makasaar, kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sebagai ajang promosi sejauh mana akselerasi yang kami dilakukan dibidang perindustrian.” (hasil wawancara dengan AAM, 16 Juli 2017)

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tentunya akan melahirkan program-program sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata dan terpadu serta berkesinambungan guna pengembangan kawasan industri. Wawancara dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam gelar kerajinan Nasional daerah dan produk industri Nusantara dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ini sebagai ajang promosi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng. Selanjut juga hal ini menjadi bahan evaluasi dari setiap kebijakan maupun program yang dijalankan oleh instansi terkait guna mencapai tujuan yang maksimal dari beberapa kebijakan dan program tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis terhadap strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng terkait dimensi-dimensi strategi yakni Tujuan, Kebijakan, dan Program yang akan menghasilkan suatu strategi dari. Berdasarkan Tujuan Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terhadap pengembangan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. yang akan terealisasi tahun ini maka penulis menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terhadap pengembangan kawasan industri Bantaeng adalah Strategi sebagai Rencana, karena seperti yang kita lihat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku yang bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian yang menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dikembangkan secara sadar dan sengaja sesuai dengan pengertian Strategi sebagai Rencana yakni Strategi adalah rencana, semacam sadar dimaksudkan yang meliputi tindakan, pedoman yang telah ditetapkan untuk menangani situasi.

Selanjutnya, beberapa implementasi strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terkait strategi yang teridentifikasi yaitu strategi sebagai Rencana dalam pengembangan Kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah :

- 1) Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap kawasan industri yang akan di kembangkan agar dapat menyusun segala perencanaan dengan sebaik-baiknya.
- 2) Pengembangan yang dilakukan terfokus pada satu titik agar kiranya pengembangan yang dilakukan terlihat hasilnya.
- 3) Melibatkan yang terkait dengan pengembangan yang akan dilakukan.
- 4) Melakukan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi baik aparatur instansi maupun pemilik industri kecil dan menengah.
- 5) Koordinasi yang harus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan industri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan Terkait dengan dimensi-dimensi strategi yaitu Tujuan, Kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng termasuk kedalam strategi sebagai rencana, karena kita dapat melihat kepala Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala Tujuan, Kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dikembangkan secara sadar.

Adapun beberapa implementasi strategi terkait dengan strategi yang teridentifikasi yaitu strateegi sebagai rencana adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap kawasan industri yang akan di kembangkan agar dapat menyusun segala perencanaan dengan sebaik-baiknya.
- 2) Pengembangan yang dilakukan terfokus pada satu titik agar kiranya pengembangan yang dilakukan terlihat hasilnya.
- 3) Melibatkan yang terkait dengan pengembangan yang akan dilakukan.
- 4) Melakukan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi baik aparatur instansi maupun pemilik industri kecil dan menengah.

- 5) Koordinasi yang harus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan industri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar sekiranya pengembangan yang terkait dengan kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang dapat terealisasi secepatnya sehingga masyarakat Bantaeng terkhususnya masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang besar dan dari pengembangan yang dilakukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikanto, suharismi, 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek Jakarta: Rineka cipta.*
- Bagus, Deny, 2009. *Konsep strategi*, <http://blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-defenisi-perumusan.html>. diakses tanggal 27 november 2016.
- Craig, C James, Robert M Grant, 1966. *Strategic manajemen*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Danuri, Rochim dan Nugroho, Iwan, *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial, Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 2004.
- Dirdjojuwono, Roestanto W, *Kawasan Industri Indonesia (Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya)*, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor, 2003.
- Grant, Robert M, 1999. *Analisi strategi kontemporer, konsep, teknik, aplikasi. Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga.
- Heene, dkk, 2010. *Manajemen strategic keorganisasian publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Herlambang, Susatyo, 2013. *Pengantar manajemen: cara mudah memahami ilmu manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hery, 2013. *Pengantar manajemen: cara cepat dan mudah memahami ilmu manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jatmiko, Rahmad Dwi, 2013. *Manajemen stratejik, Edisi pertama*, Malang: UMM.
- Kementrian Prindustrian, 2014. *Masterplan Kawasan Industri Nikel Di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Muhammad, Suarsono, 2013. *Strategi pemerintahan: Manajemen Organisasni Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Mintzberg, Henry. Dkk, 2003. *The strategy process*. Edisi keempat. New Jersey. Upper Saddle River.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Manajemen stratejik*. Jakarta: Bumi aksara
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen:

keputusan kepala BKPN No. 24 tahun 2016 tentang penetapan 14 kawasan industri.

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kabupaten Bantaeng.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng, dalam pasal 39 ayat 2, peraturan daerah tersebut.

peraturan menteri perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang pedoman teknis kawasan industri.

peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional

PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, pasal 14 tentang perindustrian.

Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 pasal 20, yaitu pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan pendidikan dan pelatihan di Wilayah pusat pertumbuhan industri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tentang Zona atau Kawasan industri.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

RIWAYAT HIDUP



HATTA Lahir di Bantaeng Tanggal 15 Maret 1993, anak pertama dari Malo dan Sia, pendidikan mulai Tahun 2000 di Sekolah Dasar Inpres Lonrong Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan lulus pada Tahun 2005 kemudian pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 3 Bantaeng dan lulus pada Tahun 2008 kemudian pada Tahun yang sama penulis melanjutkan lagi pendidikan di Sekolah Menengah Atas 2 Bantaeng dan lulus pada Tahun 2011 setelah lulus penulis terdaftar sebagai Mahasiswa angkatan 2012 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).